

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Kebijakan Penempatan TKI di Luar Negeri di Kabupaten Pati yang Dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

Implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik dan sesuai. Adapun aspek-aspek yang dianggap masih belum sesuai dan berakibat pada kurang optimalnya implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati, yakni mengenai proses pendaftaran, seleksi, dan layanan data dan informasi TKI. Sedangkan untuk proses koordinasi pelayanan penempatan TKI di Kabupaten Pati, pelaporan, dan koordinasi sudah berjalan dengan baik dan sesuai. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 belum tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh TKI sehingga masih banyak TKI yang belum mengetahui tentang kebijakan penempatan TKI di luar negeri ini. Di samping itu, penetapan target sebenarnya sudah sesuai yaitu TKI di Kabupaten Pati tetapi respon dari sebagian TKI di Kabupaten Pati dinilai tidak terlalu baik karena masih banyak TKI yang tidak disiplin dalam melengkapi dan menyesuaikan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam proses pendaftaran dan seleksi TKI seperti amanat yang tercantum di dalam Permenaker No.22 Tahun 2014 .

5.1.2 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong yang Dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dalam Mengimplementasikan Kebijakan Penempatan TKI di Luar Negeri di Kabupaten Pati

a. Faktor Penghambat

Faktor yang dianggap sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati yaitu sasaran kebijakan, sumberdaya dan kondisi sosial dari TKI di Kabupaten Pati.

Sasaran kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati adalah seluruh TKI di Kabupaten Pati. Dalam hal penempatan dan perlindungan TKI, kondisi sebagian TKI di Kabupaten Pati masih dapat dikatakan belum siap dalam menerima kebijakan ini dikarenakan masih banyak TKI yang belum turut berpartisipasi aktif dalam kebijakan ini.

Sumberdaya. Sumberdaya manusia menjadi faktor penghambat kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati dikarenakan jumlah sumber daya manusia, khususnya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati yang ikut berperan dalam implementasi kebijakan penempatan TKI ada Kepala Dinas, Kabid Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja, Kasi Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja, pengantar kerja, dan rencana setelah ada LTSA akan ditambah dengan pihak imigrasi, Dinas Kesehatan, Dispendukcapil, Kepolisian, BP3TKI Semarang, P4TKI. Untuk jumlah petugas pengantar kerja yang khusus untuk menangani kasus TKI di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dilaksanakan

oleh 1 pegawai saja. Jumlah yang terbatas ini mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati. Sedangkan sumber daya non manusia, yaitu fasilitas sangatlah dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati. Kurang tersedianya driver/sopir untuk mengantar ke tempat tujuan apabila ada TKI yang bermasalah, dan masalah printer yang kurang optimal dalam melakukan proses pelayanan terhadap TKI di Kabupaten Pati mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati.

Kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati ini ditujukan untuk TKI di Kabupaten Pati, tetapi dalam pelaksanaannya juga seharusnya melibatkan peran aktif dari TKI. Pada kenyataannya, masih banyak TKI yang belum siap untuk menerima kebijakan ini karena kondisi TKI yang belum memiliki pengetahuan cukup. Hal tersebut dibuktikan dengan peran TKI yang seharusnya dapat mengurangi adanya TKI non prosedural dinilai masih minim. Hal tersebut dibuktikan oleh masih ditemukan beberapa TKI yang belum melengkapi dan menyesuaikan dokumen-dokumen yang harus dibawa pada saat proses pendaftaran dan seleksi TKI.

b. Faktor Pendorong

Faktor yang dianggap sebagai faktor pendorong dalam implementasi kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati, yaitu karakteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi, disposisi implementor.

Karakteristik yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati selaku implementor dinilai sudah baik karena struktur birokrasi dari Dinas sudah cukup jelas dan terbagi sesuai urusan masing-masing, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan penempatan TKI di Kabupaten Pati, wewenang diberikan kepada pegawai di bidang penempatan dan pengembangan tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati.

Faktor lain yang menjadi faktor pendorong kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati ialah hubungan antar organisasi yang terjalin yaitu antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dengan PT Dewi Pengayom Bangsa yang melaksanakan kerjasama yang baik dalam bentuk rekrutmen TKI, seleksi TKI, serta laporan penerbangan (AN05) yang laporannya harus disampaikan oleh PT.Dewi Pengayom Bangsa ke pihak Dinas Tenaga Kerja Kab.Pati setiap bulannya semuanya sudah berjalan dengan baik.

Disposisi implementor menjadi sebuah faktor pendorong kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati karena adanya respon positif Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati dalam rangka mengoptimalkan kebijakan ini dengan selalu meningkatkan pelayanan yang bersih, transparan, cepat, bebas dari pungutan liar atau pemerasan. Selain itu, Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Pati juga sudah memahami tentang kebijakan penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Pati sesuai dengan Permenaker No.22 Tahun 2014.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Penempatan TKI di Luar Negeri di Kabupaten Pati, maka peneliti di sini memberikan rekomendasi :

1. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati harus memberikan sosialisasi secara merata dan mendalam tentang kebijakan penempatan TKI di luar negeri agar seluruh TKI dapat mengetahui adanya kebijakan ini dan memahami dengan benar tanggung jawab yang dimiliki oleh TKI.
2. Penambahan jumlah driver/sopir untuk mengantar pegawai di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati ke tempat tujuan apabila ada TKI yang bermasalah.